

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Didalam UUD 1945 menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dinamika perkembangan kedudukan lembaga kekuasaan kehakiman di dalam konstitusi dan dalam undang-undang, yakni sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman sampai diterbitkannya Undang-Undang kekuasaan kehakiman yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu Reformasi peradilan telah merubah status dan kedudukan hakim yang semula berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil, namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kehakiman mengubah kedudukan hakim yang sekarang berkedudukan sebagai pejabat negara. Kedudukan hakim sebagai pejabat negara diperkuat lagi dalam Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah menyebutkan secara jelas bahwa hakim itu berkedudukan sebagai pejabat negara. Namun baik dalam norma peraturan perundangan-undangan

maupun praktek dalam tugasnya, hakim itu lebih condong bekedudukan sebagai Pegawai Negeri ketimbang sebagai Pejabat Negara. Secara Normatif dalam dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012. Dualisme kedudukan hakim saat ini dimana dalam Undang-Undang hakim berkedudukan sebagai pejabat negara, tetapi dalam pelaksanaannya itu sebagai pegawai negeri sipil itu dikhawatirkan masih terdapat intervensi campur tangan kekuasaan baik eksekutif maupun legislatif yang dapat mempengaruhi independensi hakim.

2. Implikasi kedudukan hakim sebagai pejabat negara tidak murni telaksana, Kedudukan sebagai pejabat negara itu tidak hanya sekedar penyebutan pejabat saja, akan tetapi juga hak-hak dan fasilitas hakim sebagai pejabat negara itu harus diterima oleh hakim seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, karena tidak akan sama dengan hak-hak yang dimiliki dan diterima oleh pegawai negeri sipil. Hal ini dapat kita lihat dalam hal gaji, tunjangan, pangkat, golongan, pembinaan, promosi, mutasi, pengangkatan, fasilitas kesehatan dan keamanan, protokoler bahkan pensiun masih menggunakan standar sebagai pegawai negeri sipil. Dapat dengan mudah dilihat seperti di kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga, hakim itu statusnya sebagai pegawai negeri sipil, pangkat dan golongan hakim masih bergolongan seperti PNS baik itu golongan III dan IV. Berkaitan dengan hak dan fasilitas hakim sebagai pejabat negara sampai saat ini dari wawancara yang penulis dengan para hakim menyatakan bahwa hak dan fasilitas itu tidak pernah diterima oleh hakim selama hampir 18 tahun ini ditetapkan sebagai pejabat negara, meskipun gaji dan tunjangan lumayan besar namun hak dan

fasilitas lainnya belum diterima oleh hakim. Bahkan banyak hakim-hakim yang harus mengontrak rumah dan tinggal di kost-kostan sebagai tempat tinggal karena tidak ada diberikannya rumah negara, walaupun ada diberikan rumah negara itu pun diberikan rumah dinas yang tidak layak huni. Lalu berkaitan dengan fasilitas transportasi, kebanyakan hakim –hakim di daerah itu harus pulang pergi ke kantor dengan naik ojek, ataupun angkutan umum disebabkan tidak adanya fasilitas transportasi yang diberikan. Lebih mirisnya lagi berkaitan dengan fasilitas keamanan dan kesehatan tidak pernah diperhatikan, pelayanan kesehatan hakim hanya diberikan dengan standar BPJS yang sama dengan pegawai negeri sipil, fasilitas keamanan pun hanya diberikan pada hakim di dalam persidangan, bahkan hanya pada perkara-perkara besar saja, tetapi hakim ketika berada diluar pengadilan tidak diberikan perlindungan keamanan, sehingga seringkali hakim mendapatkan ancaman baik terhadap dirinya maupun anggota keluarganya sehingga dapat mempengaruhi independensi hakim dalam menjatuhkan putusan nantinya.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya, maka penulis mengajukan saran berupa:

1. Harus dilakukan itu revisi, ataupun penambahan pasal berkaitan dengan kedudukan hakim sebagai pejabat negara terhadap Undang –Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang tidak menjelaskan bagaimana sebenarnya kedudukan dan kewenangan hakim sebagai pejabat negara, bahkan menurut penulis Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat

Hakim dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Dibawah Mahkamah Agung harus direvisi bahkan dicabut karena peraturan pemerintah ini condong mendudukan kedudukan hakim itu sebagai pegawai negeri sipil ketimbang pejabat negara yang jelas-jelas diatur dalam undang-undang, sehingga tidak menimbulkan dualisme dalam tubuh hakim, sehingga jelas apa kedudukan hakim itu apakah pejabat negara ataupun pegawai negeri dan lebih itu penulis berpendapat dapat dibentuk suatu peraturan perundangan-undangan yang khusus mengenai kedudukan dan jabatan hakim sebagai pejabat negara yang saat ini belum ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

2. Hak dan fasilitas hakim yang telah dijanjikan baik dalam Undang-Undang maupun peraturan pemerintah itu benar-benar direalisasikan baik oleh pemerintah ataupun Mahkamah Agung, karena banyak hakim di daerah yang sedang sengsara karena hak dan fasilitasnya tidak diberikan serta tidak sesuai dengan apa yang diterima pejabat negara lainnya. Meskipun demikian hakim sebagai ujung tombak tegaknya keadilan jangan sampai menjadi hak dan fasilitas yang tidak diberikan itu sebagai alasan untuk tidak independen dan melanggar kode etik dan sumpah jabatan sebagai hakim. Hakim harus ditempatkan pada kedudukan yang mulia dan dapat menjaga marwahnya sebagai ujung tombak keadilan itu, hakim haruslah berkedudukan sebagai pejabat independen yang tidak dapat diintervensi dalam melaksanakan jabatan dan karier serta terpenuhi semua kebutuhan hidup sehingga hakim itu dapat fokus dalam melaksanakan tugasnya dalam mengadili perkara serta perlu adanya pengawasan yang kuat dan ketat dari para pihak untuk menjaga marwah pengadilan.

